

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan mengenai pergolakan Permesta di Bolaang Mongondow bukanlah hal yang mudah. Pergolakan yang terjadi sejak tahun 1958 – 1961 ini mempunyai dimensi yang luas karena cakupannya membahas tentang permasalahan nasional bahkan internasional oleh karena itu peristiwa ini begitu mendapatkan perhatian yang serius dari beberapa sejarawan luar antara lain R.Z. Leirisa dan Barbara Sillars Harvey dalam karya-karya besar mereka. Namun seiring berjalannya waktu, di tengah mulai pesatnya tulisan tentang sejarah sosial dari perspektif orang-orang bawah atau masyarakat bawah, maka penulisan mengenai peristiwa ini menjadi menarik kembali karena rasa keingintahuan akan kondisi masyarakat sehari-hari dalam keadaan sulit di tengah perang yang berkepanjangan antara tentara pusat dan Permesta ketika itu.

Masyarakat biasa menjadi objek kajian, itulah mungkin yang mendasari penelitian ini seperti yang telah peneliti jelaskan dalam latar belakang di atas. Dari studi sejarah sosial-politik dalam kajian penelitian, penulis mulai menelusuri tentang pengaruh dinamika politik pada masa Permesta terhadap kehidupan sosial masyarakat pada waktu itu. Muncul juga pertanyaan lain mengenai cara masyarakat bertahan hidup atau kondisi masyarakat di tengah perang saudara ini, sehingga dalam kesimpulan perlu dijelaskan beberapa hal yang penulis dapat dalam penelusuran ketika memulai penelitian hingga tahap historiografi. Bagaimana pun, tidak semua hal yang dapat disimpulkan tapi setidaknya dalam bab ini harus

dijelaskan terperinci apa saja hal-hal penting yang didapat ketika penelitian berlangsung.

Kondisi politik pada masa pergolakan, khususnya ketika kita memperkecil ruang lingkup kajian tentang dampaknya pada masyarakat Bolaang Mongondow, harus dibagi dalam tiga hal, pertama; tentang kondisi politik di pusat pada waktu itu, kedua; mengenai kebijakan politik Permesta, dan yang ketiga; tentang kondisi politik di Bolaang Mongondow menjelang dan ketika pergolakan berlangsung. Adapun mengenai kondisi sosial tentu harus benar-benar melihat bagaimana kondisi sosial-ekonomi, kehidupan sehari-hari dalam kondisi perang, serta nasib wanita dan anak-anak dalam suasana yang mencekam tersebut. Di sinilah kita bisa melihat secara tersistematis keadaan yang berlangsung ketika itu agar bisa disusun dalam kesimpulan yang mudah dipahami dan dimengerti.

Mengenai kondisi politik di pusat pada waktu itu yang menarik dianalisis adalah tidak stabilnya situasi politik dalam kurun waktu antara tahun 1950 – 1959. Ketika itu negeri ini menganut sistem parlementer yang sebenarnya kurang cocok diterapkan di tengah kondisi sosial-ekonomi yang masih bergejolak. Keadaan ekonomi nasional yang rapuh harusnya terlebih dahulu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah karena masalah ekonomi menyangkut kebutuhan rakyat banyak, yang ketika itu dilanda kemiskinan. Sementara kondisi sosial yang masih menyesuaikan dengan sistem pemerintahan terpusat tentu membutuhkan pendekatan yang lebih serius dari pemerintah khususnya terhadap golongan masyarakat yang berada di luar pulau Jawa. Namun, yang disayangkan adalah ketika hal-hal tersebut rupanya luput dari perhatian pemerintah pusat pada waktu

itu, penyebabnya adalah mereka terlalu sibuk menangani gejolak-gejolak yang terjadi di tatanan partai politik akibat saling memperebutkan dan menjatuhkan kursi kekuasaan di kabinet, sementara permasalahan sosial-ekonomi yang sudah diambang kritis kurang mendapat perhatian sama sekali.

Masalah politik di dalam dan di luar negeri akibat perang dingin menambah masalah yang harus segera diselesaikan oleh Presiden Soekarno yang baru ditinggal oleh Moh. Hatta. Kabinet yang dibentuk bukannya segera memberikan solusi dan mengambil langkah-langkah cepat menangani permasalahan dalam negeri, mereka justru sibuk menangani kabinet yang dibentuk oleh partai-partai politik yang selalu jatuh bangun. Kondisi ini menyebabkan masalah sosial-ekonomi di daerah-daerah terabaikan. Kemiskinan dan keterpurukan pembangunan dirasa oleh putra-putra daerah di Sulawesi. Mengharap pemerintah pusat dirasa seperti angin lalu saja karena pemerintah hanya bisa menangani masalah di Jawa.

Keadaan di atas menyebabkan lahirnya dewan-dewan militer di beberapa daerah yang menuntut percepatan pembangunan daerah mereka yang tertinggal agar taraf hidup masyarakat bisa meningkat. Di tengah kesibukan pemerintah menangani masalah politik luar negeri, gejolak partai politik, dan jatuh banggunya kabinet, suara-suara sumbang dari anak-anak daerah ini seakan diabaikan. Keadaan inilah yang memaksa daerah harus mengambil tindakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan sosial-ekonomi mereka walau harus bertentangan dengan regulasi yang berlaku ketika itu. Daerah melakukan perdagangan barter tanpa melalui pusat lagi, pembentuk daerah-daerah otonom sepihak, dan lain sebagainya, hal ini yang dilakukan oleh Permesta pada awal kelahirannya.

Awal lahirnya Permesta menjadi harapan untuk otonomi daerah di wilayah-wilayah yang masuk dalam pengaruhnya. Tuntutan gerakan Permesta sebenarnya adalah untuk mengoreksi sikap pemerintah yang terlalu sentralistik. Karena hal itulah maka kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Permesta cenderung lebih mengakomodasi tuntutan-tuntutan daerah yang menjadi kebutuhan mereka waktu itu. Otonomi daerah yang diperjuangkan waktu itu sangat didambakan oleh masyarakat yang ada di luar pulau Jawa karena menyangkut pembagian yang adil mengenai anggaran daerah dan pusat. Sikap pemerintah yang sentralistik tersebut akhirnya menyebabkan ketimpangan dan tidak meratanya pembangunan antara pusat dan daerah.

Kebijakan Permesta yang sangat penting adalah pembagian pulau Sulawesi menjadi dua Provinsi yakni Provinsi Sulawesi Utara dan Selatan. Tuntutan ini adalah salah satu tuntutan utama petinggi-petinggi Permesta di Sulawesi Utara kepada pemerintah pusat sebelum lahirnya gerakan Permesta, namun tidak terlalu ditanggapi oleh pemerintah, hal ini akhirnya tercapai atas kebijakan Permesta sendiri pada pertemuan di Gorontalo pada 21 Juni 1957. Secara politik, kebijakan pembentukan Provinsi Sulawesi Utara secara sepihak ini cukup menguntungkan masyarakat Bolaang Mongondow karena Gubernur H.D. Manoppo adalah putra daerah ini. Di antara kebijakan lain waktu itu adalah pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow dalam pertemuan itu.

Di Bolaang Mongondow menjelang pergolakan pada tahun 1958, kondisi politik juga belum terlalu stabil. Status Kabupaten Bolaang Mongondow yang masih ngambang pada waktu itu adalah permasalahan serius bagi tokoh-tokoh

masyarakat di daerah ini. Status kabupaten baru ini mendapat pengakuan dari konferensi Permesta yang dilaksanakan di Gorontalo, namun secara legalitas hal ini belum bisa dianggap final di pusat. Perjuangan otonomi yang menjadi isu penting bagi petinggi-petinggi di Bolaang Mongondow, membuat Partai Masyumi menjadi pemenang di daerah ini. Hal ini karena memang diketahui bahwa Masyumi merupakan partai yang sangat jelas garis perjuangannya mengenai otonomi daerah luar pulau Jawa, masyarakat Bolaang Mongondow ingin memanfaatkan partai ini untuk menjadi sarana politik dalam menyuarakan aspirasi dan tuntutan mengenai otonomi daerah yang sedang diperjuangkan.

Berbagai dinamika politik yang terjadi pada masa pergolakan Permesta mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat Bolaang Mongondow dari berbagai macam segi kehidupannya. Padahal sebelum pergolakan kehidupan sosial masyarakat menyangkut kehidupan sehari-hari penuh dengan kedamaian sejak penyerahan kedaulatan pada tahun 1950. Kekacauan baru terjadi sejak tahun 1958 – 1961 yang membawa duka tersendiri bagi masyarakat di sana. Menjelang pergolakan jika dibandingkan dengan daerah lain, Bolaang Mongondow yang paling tertinggal infrastruktur kehidupan sosial masyarakat karena kurangnya sumber daya manusia (SDA) akibat masih minimnya fasilitas pendidikan yang memadai di daerah ini.

Monopoli yayasan kopra dipusat mendapat kritikan dari tokoh-tokoh Permesta sebelum adanya pergolakan. Atas desakan dari tokoh-tokoh penting militer ini, yayasan kopra Minahasa akhirnya diakui oleh pemerintah pusat sehingga mereka berhak melakukan perdagangan barter meski tanpa melalui Jawa

lagi. Yang jadi masalah adalah, ketika yayasan kopra Minahasa ini juga melakukan monopoli atas kopra-kopra di daerah lain tetangganya seperti Sangihe-Talaud, Bolaang Mongondow, dan Gorontalo sehingga pada tanggal 10 November 1955 yayasan kopra di daerah ini melakukan kritik dan ingin juga diakui oleh pusat, hanya saja waktu itu yang diakui hanya yayasan kopra di Sangihe-Talaud.

Di tengah himpitan ekonomi yang parah, masalah baru muncul bagi masyarakat Bolaang Mongondow ketika pecah perang antara tentara pusat dan Permesta pada Februari 1958. Keadaan ini membuat kacau suasana masyarakat ketika itu, dan masyarakat berbondong-bondong mulai mengungsi ke kebun-kebun dan ke hutan-hutan karena takut akan terlibat dalam perang. Ketika perang berlangsung seluruh aparat pemerintah daerah hingga desa harus tunduk terhadap Permesta, hal ini dirasa oleh kepala desa (*Sangadi*) yang bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat di desanya, jika kedatangan pro pusat mereka yang akan lebih dahulu di eksekusi, ditembak, dipotong, bahkan ada yang dibuang ke laut.

Tekanan yang dirasakan masyarakat Bolaang Mongondow waktu itu datang dari pihak Permesta di mana mereka selalu menjarah ternak warga, mengancam, menuduh masyarakat dengan tuduhan pro pusat, dan tekanan-tekanan yang membunuh mental masyarakat. Di tengah kondisi ini sebagian besar masyarakat lebih memilih menyingkir ke hutan agar merasa aman dari tekanan. Namun ketika di persembunyian masalah baru muncul ketika mereka dihadapkan pada suatu kondisi yang pahit seperti kelaparan, diterpa penyakit malaria, bahkan banyak sekali anak-anak yang mati di hutan karena terkena wabah diare seperti kasus yang terjadi pada para pengungsi-pengungsi dari Desa Tobayagan yang bersembunyi di

hutan. Nasib wanita juga sangat menyedihkan karena ditinggal lari oleh suami dan anak-anak lelaki mereka yang remaja maupun dewasa, jadi mereka yang tidak bisa lari tentu mendapat tekanan dan ancaman ketika itu. Mereka dibuat jadwal dan kelompok-kelompok untuk memasak di dapur umum yang dibuat oleh Permesta untuk memasak makanan tentara-tentara tersebut, mereka bahkan diintimidasi, diberi pertanyaan segala rupa yang semakin membuat kondisi kehidupan mereka semakin menyedihkan.

Kelaparan dirasa oleh masyarakat ketika itu karena seluruh lahan dan persawahan tidak ditanami. Kebanyakan petani takut ke sawah atau ke kebun karena takut tertembak atau dituduh sebagai mata-mata. Mereka memakan makanan seadanya seperti pisang dan ubi kayu ketika di persembunyian. Ada juga yang makan jagung di giling, dalam keadaan demikian apa saja menurut mereka bisa dimakan selama itu halal dan bisa menyambung kehidupan. Ada juga waktu itu petani-petani yang mencuri-curi kesempatan aman untuk bekerja di sawah atau ladang, tapi ketika sewaktu-waktu terjadi perang mereka akan melarikan diri kembali ke tempat persembunyian.

Waktu pergolakan mata uang republik Indonesia tidak berlaku di wilayah Permesta. Yang berlaku hanya mata uang 'Basoka', jenis mata uang yang diedarkan oleh Permesta pada waktu itu. Ia terdiri dari beberapa pecahan antara lain 10.000, 25.000, dan 100.000. waktu itu harga pisang seponon saja harganya 25.000 uang Basoka. Pada waktu pergolakan di Kotamobagu juga sempat terjadi krisis garam, yang dirasa oleh masyarakat hampir semua pedalaman waktu itu. Kondisi pendidikan benar-benar lumpuh. Sekolah-sekolah ditutup, anak-anak sekolah pada

saat pergolakan semua diungsikan oleh orang-orang tua mereka ke kebun bahkan ada yang masuk dan bersembunyi di hutan.

Setelah menjelang berakhirnya pergolakan, Kotamobagu dan wilayah-wilayah lain di Bolaang Mongondow dibumi hanguskan oleh Permesta. Hal ini menyebabkan beribu-ribu kepala keluarga kehilangan rumah sehingga waktu itu TNI membuat tenda-tenda darurat sambil menunggu masyarakat membuat gubuk seadanya untuk tempat tinggal mereka. Akibat hal ini masyarakat menjadi antipati terhadap Permesta dan menyebabkan kemiskinan dan kemalaratan semakin dirasa oleh masyarakat ketika itu. Sementara untuk membangun daerah ini membutuhkan waktu sekitar 30 tahun, karena setelah pembakaran, Bolaang Mongondow seperti kembali ke titik nol, bahkan ada yang berkomentar bahwa masa pembakaran itu membuat daerah itu seperti di zaman batu.

Pembakaran Kotamobagu sesaat sebelum direbut oleh TNI dari Divisi Siliwangi adalah konflik etnis antara Minahasa dan Bolaang Mongondow. Masyarakat Bolaang Mongondow menstigmatisasi bahwa setiap orang Minahasa yang tinggal di daerah itu adalah Permesta sehingga mereka melampiaskan kemarahan mereka terhadap orang-orang Minahasa yang tinggal di sana. Kebencian ini disebabkan oleh pembakaran yang dilakukan oleh Permesta yang sebagian besar berasal dari daerah Minahasa sehingga masyarakat transmigrasi Minahasa di Dumoga dan daerah-daerah lainnya menjadi korban amarah dan kebencian masyarakat ketika itu.

Masyarakat Bolaang Mongondow sebenarnya pada masa awal lahirnya Permesta masih simpati dengan gerakan ini. Lambat laun simpati ini berubah

menjadi antipati terhadap Permesta karena kenyataan di lapangan sebagian tentara Permesta justru melakukan tindakan yang tidak manusiawi terhadap penduduk asli di Bolaang Mongondow. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa tindakan ini antara lain mencuri ternak dan hasil pertanian warga, membunuh keluarga-keluarga mereka, dan lain sebagainya.

Kesimpulan dari masalah di atas yakni kita harus melihat secara bijak apa itu Permesta dan bagaimana gerakan-gerakan tentara di bawahnya. Yang perlu dipisahkan di sini adalah bahwa Permesta hanyalah suatu rancangan program yang berisi harapan, cita-cita, dan rencana pembangunan daerah yang berasaskan pada landasan otonomi daerah sebagaimana yang menjadi tuntutan pada waktu itu. Sementara itu dari aspek gerakan, kita harus memahami bahwa segala tindakan tidak manusiawi yang dilakukan oleh tentara Permesta pada waktu itu hanyalah tindakan pribadi tentara yang tidak disiplin karena pada waktu itu sebagian besar tentara Permesta tidak melalui pendidikan formal kemiliteran. Kebanyakan dari mereka hanyalah para pemuda-pemuda di desa-desa yang tidak bersekolah dan direkrut menjadi tentara. Ketika di lapangan, tentara-tentara seperti inilah yang tidak disiplin dalam tugas, bahkan ada yang justru menganiyaya bahkan membunuh masyarakat yang tidak bersalah karena sikap pribadi mereka sendiri. Jadi dalam hal ini, bukanlah Permesta yang salah, tetapi tindakan negatif di lapangan disebabkan oleh tentara-tentara yang tidak disiplin bahkan ada yang tidak tahu apa tujuan dan cita-cita mulia dari gerakan Permesta itu sendiri.

Walaupun kita mengumpulkan berbagai persepsi yang berbeda-beda dari masyarakat mengenai pergolakan Permesta pada tahun 1958 – 1961, semua

berujung pada satu kesimpulan yang sama bahwa perang hanya akan menyebabkan kerugian antara kedua belah pihak yang bertikai. Di balik kerugian itu, rakyat yang tidak bersalah akhirnya menjadi korban dan merasakan dampaknya baik dari aspek sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Melalui penelitian ini penulis telah berusaha menggambarkan bagaimana Permesta di Bolaang Mongondow tahun 1956 – 1963 yang dianalisis melalui pendekatan sejarah sosial-politik. Mungkin itulah beberapa hal yang dapat disimpulkan dalam bab ini. Untuk lebih jelas dan terperinci, tentu harus membaca keseluruhan isi penelitian ini agar bisa mendapat pemahaman yang lebih mengenai kondisi masyarakat Bolaang Mongondow dalam perang yang terjadi akibat pergolakan Permesta (1958 – 1961).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Taufik, dkk. 1999. *Sejarah: Pemikiran, Rekonstruksi, Persepsi*. Jakarta: MSI dan Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Carr, E.H. 1964. *What is History?*. Penguin Books. London. Terjemahan Gatot Triwira. 2014. *Apa Itu Sejarah*. Edisi Pertama. Komunitas Bambu. Depok
- Damopolii, A.R, dkk. 2003. *Sejarah Bolaang Mongondow; Untuk SLTP/MTs*. Jakarta. CV Cakra Media.
- Damopolii, H.J.A. 2003, *Dodandian, Kinotanoban dan Kisahku*. Kotamobagu. Yayasan Ibnu Sabil.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (___). *Arsitektur Tradisional Sulawesi Utara*.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (___). *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Sulawesi Utara (Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*.
- Dien Madjid, M, dan Johan Wahyudhi. 2014. *Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar*. Jakarta. Prenada Media Group.
- Dilapanga, Muh. 2012. *Serpihan-serpihan Fakta dan Peristiwa di Bolaang Mongondow Tanah leluhurku*. Kotamobagu. Yayasan Totabuan.
- Harvey, Barbara Sillars. 1989. *Permesta: Pemberontakan Setengah Hati*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Helius Sjamsuddin. 2012. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Kuntowijoyo. 1994. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta. PT. Tiara Wacana Yogya.
- Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mokoginta, Abdullah. 2010. *Dari Kampung Mengukir Asa Mengabdikan Pada Negara; Memoar Anak Desa Bilalang*. Bekasi. Bolmong Press.
- Nordholt, Henk Schulte, Bambang Purwanto, Ratna Saptari (eds). 2014. *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia*. Jakarta. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Notosusanto, Nugroho. 1992. *Sejarah Nasional Indonesia 3; Untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (Cetakan ke-3)*. Jakarta. Depdikbud.
- Ranawidjaja Usep. 1955. *Swapradja Sekarang dan dihari Kemudian*. Djakarta. Djambatan.
- Santoso, Budi (eds). 2005. *Hikmat Indonesia Masa Kini, Hikmah Masa Lalu Rakyat*. Yogyakarta. Kanisius.
- Simanjuntak, Bungaran Antonius, dan Soedjito Sosrodihardjo. 2014. *Metode Penelitian Sosial (edisi revisi)*. Jakarta. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sudiyo. 2004. *Perhimpunan Indonesia*. Jakarta. PT Bina Adiaksara & PT Rineka Cipta.
- Sulu, Phill M. 2011. *Permesta dalam Romantika, Kemelut, dan Misteri*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Syafiie, Inu Kencana dan Azhari, (2012), *Sistem Politik Indonesia (Edisi Revisi)*. Bandung. PT. Refika Aditama.

Jurnal, Tesis, Skripsi, dan Pedoman Skripsi

- Endah Sulistyawati. 2013. *Peranan Intervensi Asing Dalam Pemerintahan Soekarno 1945 – 1966. Skripsi*. Program Strata 1 Universitas Pendidikan Indonesia. Depok.
- Leirisa, R. Z. 1999. *PRRI-Permesta: Tinjauan Histriografis*, Jurnal Studi Amerika Vol. IV Januari – Juli 1999. <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/90435-JSAM-IV-JanJul1999-56.pdf>. 28 Februari 2017 (18:51).
- Mohamad Baharudi Podomi. 2010. *Sistem Politik Kerajaan Bolaang Mongondow Di Sulawesi Utara*. Tesis. Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta.
- Murdani Mokodongan. 2014. *Permesta di Bolaang Mongondow 1958 – 1961 (Penelitian di Kecamatan Bilalang)*. Skripsi. Program Strata 1 Jurusan Pend. Sejarah, UNG. Gorontalo.
- Saafroedin Bahar. 1999. *PRRI-Permesta: sebuah kasus keterkaitan antara masalah integrasi Nasional dan perang dingin*, Jurnal Studi Amerika

Vol. IV Januari – Juli 1999. <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/90433-JSAM-IV-JanJul1999-28.pdf>. 28 Februari 2017 (18:51).

H.N. Ventje Sumual. 1999. *Permesta: Gerakan Yang Dilahirkan Pemikiran Kritis Menyatu dengan Praxis Kehidupan Sosial Politik*, Jurnal Studi Amerika Vol. IV Januari – Juli 1999. [http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/90432-JSAM-IV-Januari – Juli 1999-15.pdf](http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/90432-JSAM-IV-Januari-Juli-1999-15.pdf). 28 Februari 2017 (18:51).

Biodata Responden



....

Nama : Tompinit Van Deim
Umur : 69 Tahun
Tempat/Tanggal Lahir : Tobayagan (1948)
Alamat : Desa Tobayagan, Kec. Pinolosian Tengah, Kab. Bolaang
Mongondow Selatan
Wawancara : 06 Agustus 2016

Tompinit Van Deim ketika pergolakan Permesta (1958 – 1961) masih berusia 10 Tahun. Walaupun di usia anak-anak, tetapi peristiwa tersebut telah membekas dalam ingatan-ingatan beliau selama 69 tahun ini. Trauma psikologis keadaan perang membuat ingatan itu tidak pernah hilang bahkan sering diceritakannya pada anak-cucu. Ketika pergolakan terjadi, beliau duduk di bangku sekolah dasar (SD). Beliau juga merasakan suasana-susana genting pengungsian besar-besaran masyarakat ke hutan. Di tempat pengungsian tersebut, beliau ingat betul teman-teman sebayanya yang meninggal akibat penyakit diare dan malaria di tempat persembunyian. Cerita tragis suasana genting tersebut diceritakan ketika proses wawancara dengan beliau di Desa Tobayagan, Bolaang Mongondow Selatan.



...

Nama : Andatu Mokoginta
Umur : 73 Tahun
Tempat/Tanggal Lahir : Tabang, (1944)
Alamat : Desa Tabang, Kec. Kotamobagu Selatan, Kota
Kotamobagu
Wawancara : 05 Mei 2016

Andatu Mokoginta adalah saksi sejarah yang sempat penulis wawancarai di Kotamobagu. Ketika pergolakan berlangsung, beliau sudah berusia remaja (14 – 17 tahun) sehingga sudah mengerti betul bagaimana kondisi masyarakat dalam suasana perang tersebut. Beliau lari ke hutan bersama warga-warga lainnya karena takut akan terkena dampak dari baku tembak antara TNI dan Permesta ketika suasana perang mulai berkecamuk. Ketika pergolakan beliau lari dengan keluarga ke perkebunan desa Tabang di wilayah pingiran Kotamobagu. Di sinilah beliau hidup penuh dengan berbagai macam pengalaman yang mencekam dan ketakutan karena kondisi perang. Beliau baru kembali dari pengungsian ketika suasana sudah mulai kondusif di wilayah Kotamobagu yang rata dengan tanah akibat pembumi hangusan oleh Permesta tahun 1959.



...

Nama : Abdul Walid Kapoyos
Umur : 76 Tahun
Tempat/Tanggal Lahir : Tondano, 14 April 1940
Alamat : Desa Poyowa Besar, Kec. Kotamobagu Selatan, Kota
Kotamobagu
Wawancara : 28 Juni 2016

Abdul Walid Kapoyos pada masa pergolakan Permesta adalah tentara Permesta dari (CTP, Batalion P Kompi 1) yang beroperasi di wilayah Tondano. Informasi mengenai kubu interen Permesta banyak diberikan oleh beliau ketika masih proses wawancara. Berbagai macam pandangan diberikan oleh beliau mengenai kronologis perjuangan ketika itu. Beliau bahkan pernah mengikuti indoktrinasi di Jawa setelah selesai pergolakan. Beliau juga salah satu pemimpin operasi pagar betis di Tondano ketika penumpasan PKI tahun 1965. Saat ini beliau sudah berusia 76 tahun.

Dokumentasi



Mata Uang resmi yang beredar di wilayah Permesta tahun 1957 – 1961
(Sumber: Doc. Jalan Pedang, Kompas TV)



Gedung RRI Manado Setelah di Bom AURI Tanggal 15 Februari 1958
(Sumber: Doc. Jalan Pedang, Kompas TV)



Pasukan TNI Memasuki Kotamobagu 1959
(Sumber: Doc. Jalan Pedang, Kompas TV)



Pasukan TNI Membangun Jembatan Darurat di Kotamobagu 1959
(Sumber: Doc. Jalan Pedang, Kompas TV)



Gedung Pusat Permesta di Manado 1958
(Sumber: Doc. Jalan Pedang, Kompas TV)

Dolf Runturambi sedang memimpin suatu apel akbar Permesta
Di Kotamobagu Tahun 1958



(Sumber: Koleksi Bode G. Talumewo, Koordinator Bidang Sejarah di Institut
Kajian Budaya Minahasa, Pengelola Majalah Waleta Minahasa)

Pengumuman Penjabat Komandan Komando Daerah Militer Sulawesi Utara Tengah Mayor Eddy Mongdong mengambil alih komando militer Permesta (berkhianat) saat pendaratan Tentara Pusat Jakarta, 16 Agustus 1958.

Pengumuman Pejabat Komandan KDM-SUT Mayor Eddy Mongdong No. 1 Tanggal 16 Agustus 1958

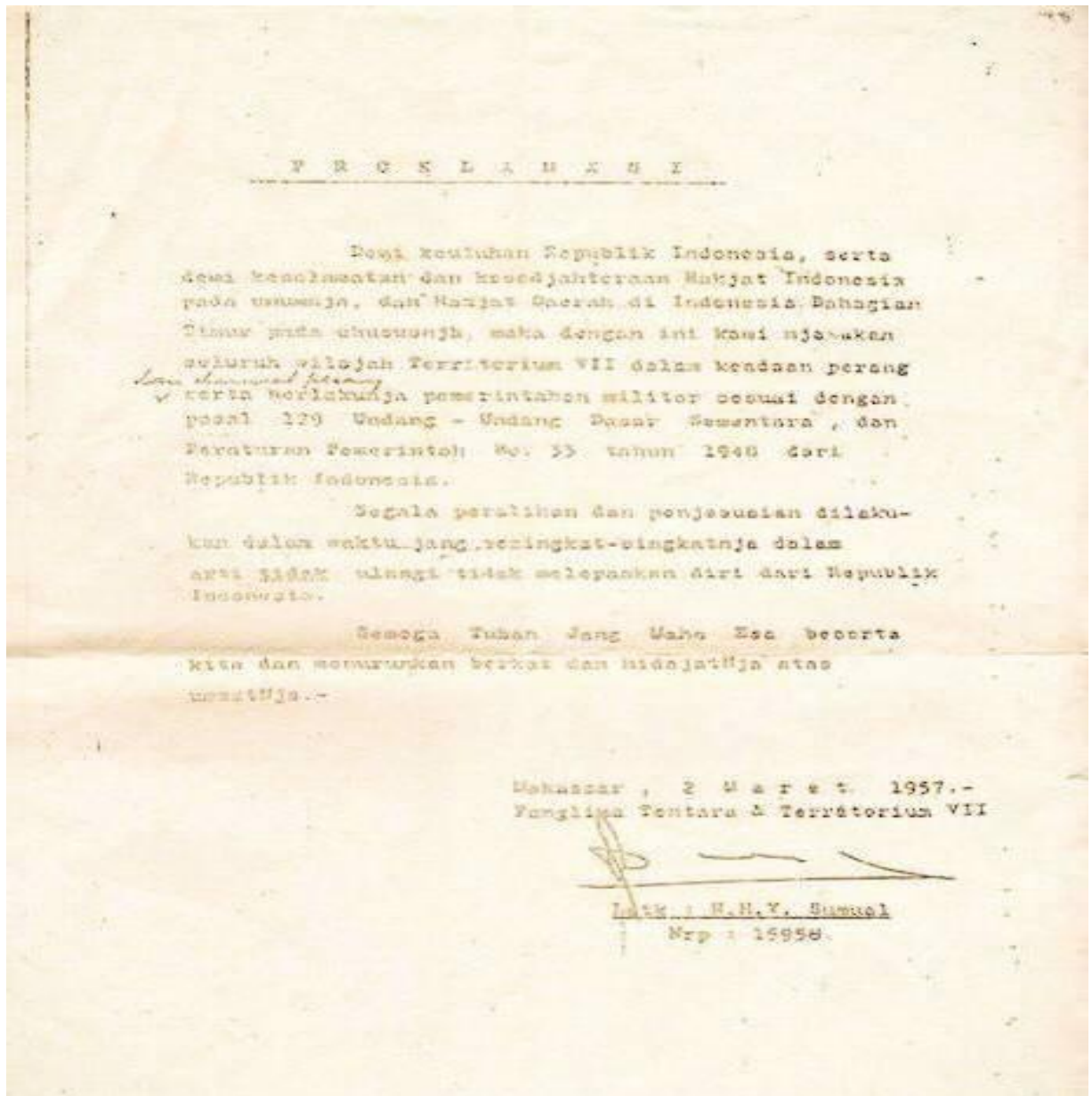
**KOMANDO DAERAH MILITER
SULAWESI UTARA/TENGAH**

PENGUMUMAN NO: 1.

MENGINGAT PERKEMBANGAN KEADAAN DEWASA INI JANG
MELIPUTI DAERAH MINAHASA/MANADO CHUSUSNJA DAN
DAERAH SULAWESI UTARA/TENGAH PADA UMUMNJA JANG
KARENA AKIBAT PERTIKAIAN DENGAN DJALAN PERTEMPURAN
TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN KEPADA RAKJAT
PRADJURIT DAN TERHADAP PERDJUANGAN BANGSA SENDIRI.

(Sumber: Koleksi Bode G. Talumewo, Koordinator Bidang Sejarah di Institut Kajian Budaya Minahasa, Pengelolah Majalah Waleta Minahasa)

Teks Proklamasi Permesta



(Sumber: Koleksi Bode G. Talumewo, Koordinator Bidang Sejarah di Institut Kajian Budaya Minahasa, Pengelolah Majalah Waleta Minahasa)



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, 96128
Telp. (0435) 827281, Fax. (0435) 821752 Gorontalo
Laman : <http://www.ung.ac.id>

SURAT TUGAS MENELITI

Nomor : 1309 /UN47.B2.1/AK/2016

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo, dengan ini memberikan surat tugas meneliti kepada :

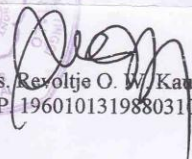
Nama : Murdiono Prasetio Mokoginta
NIM : 231413022
Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial/Pendidikan Sejarah
Angkatan : 2013/2014

untuk mengadakan penelitian sehubungan dengan penulisan/penyusunan Skripsi yang berjudul :

" Permesta Di Bolaang Mongondow Tahun 1956 – 1963 (Studi Sosial – Politik) "

Demikian surat tugas meneliti ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

26 April 2016
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,


Drs. Revoltje O. W. Kananang, M.Pd
NIP. 196010131988031003

Tembusan Yth.

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial UNG (sebagai laporan);
2. Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah FIS UNG.



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
FAKULTAS ILMU SOSIAL**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor. 6 Kota Gorontalo, 96128
Telepon (0435) 821125-831944, Faximile (0435) 821752
Laman: <http://www.ung.ac.id>

**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**
Nomor : 354/UN47.B2.1/AK/2016

Tentang

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 tahun 2006
 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 11 Tahun 2015
 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.05/2009
 5. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 372/H47.A2/KP/2009
 6. Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 1632/UN47 /KP/2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat dan menetapkan Dosen Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

No.	Nama	NIP	Jabatan	Gol.	Ket.
1.	Drs. Joni Apriyanto, M.Hum	196804011993031004	Lektor Kepala	IV/b	Pemb. I
2.	Sutrisno Mohamad, S.Pd, M.Pd	197401212008011006	Lektor	III/c	Pemb. II

Dalam penyusunan Skripsi bagi mahasiswa :

Nama : Murdiono P. Mokoginta

NIM : 231413022

Program Studi : Pendidikan Sejarah

Kedua : Judul Skripsi "PERMESTA DI BOLAANG MONGONDOW TAHUN 1956 – 1963 (Studi Sejarah Sosial Politik)".

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo

Pada tanggal : 16 Maret 2016

Dekan,

Dr. Sastro M. Wantu, SH, M.Si

NIP 196609031996031001

Tembusan Yth,

1. Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah
2. Kasubag Keuangan dan Kepegawaian FIS
3. Drs. Joni Apriyanto, M.Hum
4. Sutrisno Mohamad, S.Pd, M.Pd
5. Mahasiswa Ybs.



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Kampus Mogolaing Kota Kotamobagu

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 24/BKBP-KK/SPP/V/2016

- a. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
- b. Menimbang : Surat dari Universitas Negeri Gorontalo Fakultas Ilmu Sosial Nomor 1309/UN47.B2.1/AK/2016 Tanggal 26 April 2016 Perihal Rekomendasi Penelitian.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

- a. Nama/Obyek : Murdiono Prasetyo Mokoginta
- b. NIM : 231413022
- c. Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial/Pendidikan Sejarah
- d. Jabatan/Tempat/Identitas : Mahasiswa/Tabang/ NIK. 7174032810930003
- e. Untuk : 1) Melakukan penelitian, dengan penyusunan Skripsi berjudul :
" *Permesta Di Bolaang Mongondow Tahun 1956 – 1963 (Studi Sosial-Politik)*"
- 2) Lokasi Penelitian :
- Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Kotamobagu.
- Wilayah Kota Kotamobagu (Masyarakat).
- 3) Waktu/lama penelitian : Tanggal 3 Mei 2016 s/d 3 September 2016.
- 4) Bidang penelitian : Sosial
- 5) Status penelitian : Baru.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Kotamobagu, 3 Mei 2016



Tembusan Kepada Yth :

1. Ibu Walikota Kota Kotamobagu (sebagai laporan)
2. Kakan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Kotamobagu.
3. Camat se Kota Kotamobagu.
4. Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah FIS UNG di Gorontalo.
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip,-

Curriculum Vitae



Murdiono Prasetio Mokoginta adalah anak ketiga dari pasangan Puinga Mokoginta (Alm) dan Daia Van Deim. Lahir di Desa Tabang, Kec. Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu pada 28 Oktober 1993. Menempuh pendidikan di SDN 1 Tabang tahun 1999 – 2005, dan di SMPN 3 Lolayan pada tahun 2005 – 2006. Karena suatu kendala, ia sempat berhenti ketika masih duduk di kelas 2 SMP. Tidak patah semangat, ia berusaha menamatkan SMP dengan mengikuti ujian kesetaraan (Paket B) pada tahun 2009 dan kembali melanjutkan sekolah menengah formal di SMA Islam Baitul Hikmah Kotamobagu pada tahun 2009 – 2012. Setelah lulus, sempat berhenti selama setahun dari 2012 – 2013, dan melanjutkan kejenjang PTN pada tahun 2013 mengambil studi S1 Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. Selama di Perguruan Tinggi, kegiatan dan prestasi yang pernah diperoleh antara lain:

Organisasi :

- 1) Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Pendidikan Sejarah periode 2014.
- 2) Menjabat Sekertaris Umum HMJ Pendidikan Sejarah periode 2015.
- 3) Menjabat Ketua Departemen Advokasi dan HAM Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial periode 2016.
- 4) Menjadi salah satu Paslon pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) UNG 2017.

Prestasi :

- 1) Mahasiswa baru terbaik tingkat Fakultas Ilmu Sosial pada MOMB tahun 2013.
- 2) Juara 3 Debat Mahasiswa pada kegiatan PASGA-Fakultas Ilmu Sosial (Delagasi Jurusan Sejarah) tahun 2013.
- 3) Juara 1 Seleksi Mawapres tingkat Fakultas Ilmu Sosial tahun 2015.
- 4) Mawapres (Mahasiswa Berprestasi) Universitas Negeri Gorontalo tahun 2015.
- 5) Juara 2 Lomba menulis esai kegiatan Himakom (Himpunan Mahasiswa Komunikasi) UNG, tahun 2016.
- 6) Menjadi kolomnis artikel di media nasional Indoprogres tahun 2016.
- 7) Menjadi kolomnis opini surat kabar harian lokal Radar Bolmong tahun (2014 – Sekarang).
- 8) Menjadi kolomnis opini di media kampus UNG, LPM (Lembaga Pers Mahasiswa) Merah Maron (2016 – Sekarang).